

## PELEMBAGAAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) DAN KONSTELASI POLITIK ETNIS TIONGHOA

Dina Fadiyah

Dosen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945  
Jalan Sunter Permai Raya - Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara

Email: [dinafadiyah@hotmail.com](mailto:dinafadiyah@hotmail.com)

### ABSTRAK

Tulisan ini ingin melihat bagaimana pelembagaan partai PDIP yang selama ini dikenal sebagai partai besar dan hebat. Banyaknya etnis Tionghoa didalam partai tersebut menjadi tantangan tersendiri karena tidak mudah menjaga kelembagaan suatu partai ketika partai tersebut didominasi oleh etnis tertentu. Dengan menggunakan teori pelembagaan partai dan dipadukan dengan metode kualitatif analisis wacana, hipotesanya adalah bahwa dengan banyaknya etnis Tionghoa di dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membuat partai tersebut menjadi tidak otonom dengan adanya beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh partai PDIP yang pro-China dan sangat menguntungkan etnis Tionghoa.

**Kata kunci:** pelembagaan partai, partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP), etnis Tionghoa

### PENDAHULUAN

Tulisan ini bermula dari kegelisahan terhadap kelembagaan suatu partai politik yang semakin hari semakin dipertanyakan kemandiriannya. Dalam tulisan ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi objek penelitian penulis karena banyaknya anggota dari partai politik tersebut yang beretnis Tionghoa. Kajian ini mencoba untuk memotret sejauh mana kemandirian suatu partai politik terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, meskipun banyak anggota yang beretnis tertentu didalam suatu partai politik tersebut.

Runtuhnya rezim Orde Baru membawa perubahan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Salah satu perubahan mendasar yang terlihat adalah berubahnya struktur politik dari otoriter menjadi demokratis<sup>1</sup>. Pada saat yang sama, sistem demokrasi yang diterapkan membawa implikasi luas bagi segenap warga negara. Kelompok-kelompok minoritas yang dibelenggu hak-hak konstitusionalnya selama rezim Orde Baru, kembali muncul menagih

---

<sup>1</sup> Pratikno. 2005. *“Local Democracy and Governance in Indonesia”*, dalam Priyambudi Sulistyanto, et. al (eds.), *Regionalism in Post-Soeharto Indonesia*: Routledge Curzon

kesetaraan perlakuan seperti yang dirasakan kelompok mayoritas. Termasuk misalnya, etnis Tionghoa yang selama orde baru selalu “dibungkamkan” hak kebebasannya.

Ketika etnis Tionghoa sudah mulai berani untuk mengeluarkan dirinya dari belenggu “dibungkamkan” nya selama masa orde lama, mereka mencoba untuk bisa diterima dikalangan masyarakat luas dengan memasuki wadah-wadah atau organisasi yang banyak di isi oleh kaum pribumi. Seperti misalnya partai politik. Dimana partai politik merupakan salah satu saluran bagi masyarakat untuk menyalurkan minat dan bakatnya dalam hal politik, termasuk salah satunya adalah etnis Tionghoa. Keterlibatan etnis Tionghoa dalam suatu periode dalam struktur politik merupakan suatu hal yang menarik untuk dibahas.

Hal ini lantaran geliat hasrat politik etnis Tionghoa dalam kancah politik ini tentu akan memberikan warna baru dalam kehidupan politik yang ada. Hal ini tentu saja memberikan harapan dan gambaran baru, bahwasanya politik adalah merupakan ruang bebas yang dapat diakses oleh semua golongan. selain itu keberadaan etnis Tionghoa pun dalam politik menjadi pembuktian kepada masyarakat bahwa keberadaannya dalam politik merupakan hal yang positif dan menghilangkan stereotip yang dilekatkan selama ini. Dan hal ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi setiap partai politik yang memiliki banyak anggota dengan etnis Tionghoa. Kelembagaan partai tersebut menjadi sebuah taruhan, apakah partai politik tersebut sudah terlembaga dengan baik atau justru kelembagaan partai politik tersebut dipertanyakan dan berimbas kepada kebijakan partai dengan banyaknya anggota partai yang beretnis Tionghoa?

Jika diamati, selama ini kajian yang spesifik membahas mengenai kelembagaan partai politik lebih fokus kepada kemandirian partai politik itu sendiri, tanpa adanya unsur-unsur dari pihak luar. Seperti misalnya Panca Haqiqi<sup>2</sup> yang meneliti tentang pelembagaan Partai NasDem, menurutnya, dalam melakukan proses pelembagaan Partai NasDem menggunakan konsolidasi politik yang terbagi menjadi tiga tahapan. Pertama, konsolidasi pelembagaan untuk pembentukan partai, penyusunan kepengurusan, dan perekrutan kader. Kedua, konsolidasi pelembagaan untuk persiapan Pemilu Legislatif. Ketiga, konsolidasi pelembagaan untuk melakukan evaluasi setelah Pemilu Legislatif.

---

<sup>2</sup> Panca Haqiqi. 2014. *Pelembagaan Partai NasDem (Studi Kasus Pelembagaan DPD Partai NasDem Kota Surabaya dalam Menghadapi Pemilu Legislatif 2014)*. *Jurnal Politik Muda*, Vol 3 No. 3, Agustus-Desember 2014, hlm. 422

Menurut Budi Prayitno<sup>3</sup> yang memfokuskan penelitiannya di PDIP Jateng, pelebagaan politik PDIP Jateng masih dalam derajat pelebagaan yang rendah. Kesimpulan ini diambil dari penaksiran terhadap hasil penelitian pada setiap parameter yang digunakan. Kondisi ini terjadi akibat dominannya porsi yang diambil DPP PDIP dalam menentukan segala keputusan politik di daerah. DPD PDIP Jateng sebagai kepanjangan tangan partai di daerah hanya diperankan sebagai objek penderita dari keputusan yang dikeluarkan oleh DPP PDIP.

Berbeda dengan keduanya, Fajar Novi Eristyawan dalam jurnalnya yang berjudul *Pelebagaan Partai Kebangkitan Bangsa Studi Kasus Kemosotan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2009 di Jawa Timur*, menghasilkan bahwa pelebagaan partai yang rendah menjadi penyebab utama kemosotan suara tersebut PKB pada saat itu. Rendahnya pelebagaan PKB salah satunya dapat dilihat dari friksi-friksi yang terjadi antar faksi-faksi yang ada di internal PKB. Friksi-friksi yang terjadi menunjukkan kurang kuatnya dimensi kesisteman atau *systemness* dalam tubuh PKB. Rendahnya dimensi kesisteman tersebutlah yang akhirnya menimbulkan perpecahan di internal PKB dan menjadi penyebab utama kemosotan suara PKB pada pemilu tahun 2009<sup>4</sup>.

Dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut jelas bahwa pelebagaan didalam suatu partai politik masih dipertanyakan dan sangat mempengaruhi pada perolehan suara ketika pemilihan. Oleh karena itu, tulisan ini ingin menjawab apakah partai politik besar dan berkelas seperti PDIP sudah mampu melelebagaan partainya sehingga *independent* dari hasutan anggota didalamnya? Atau bahkan justru mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh partai?

## PELEMBAGAAN PARTAI

Menurut Huntington (1968), pelebagaan adalah sebuah proses dimana organisasi menetapkan prosedur untuk mencapai stabilitas. Melalui 4 dimensi pelebagaan yaitu yang pertama adaptasi, adaptasi adalah kemampuan untuk bertahan setelah partai lepas dari generasi pertama pendiri. Salah satu caranya dengan adaptasi fungsional misal dengan representasi atau oposisi pada pemerintah. Kedua, kompleksitas, yaitu jumlah sub unit partai politik. Ketiga,

---

<sup>3</sup> Budi Prayitno. 2009. *Pelebagaan Politik PDIP Jateng*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, hlm.3

<sup>4</sup> Fajar Novi Eristyawan. 2014. *Pelebagaan Partai Kebangkitan Bangsa Studi Kasus Kemosotan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2009 di Jawa Timur*. *Jurnal Politik Muda*, vol. 3 No. 2, hlm. 50

otonomi, otonomi adalah derajat diferensiasi dari kelompok sosial lain. Keempat, koherensi yang merupakan tingkat konsesus dalam organisasi termasuk bagaimana menyelesaikan permasalahan yang timbul.<sup>5</sup>

Menurut Panebianco (1988), pelembagaan yang terjadi dalam partai ditandai dengan kepemilikan paling berharga karena memiliki tujuan tak terpisahkan. Terjadi proses pelestarian dan kelangsungan hidup menjadi tujuan basis pendukungnya. Kerja partai diisi proses sistem insentif internal, yaitu insentif selektif untuk mereka yang memiliki minat dalam kepemimpinan dan insentif yang lebih kolektif yang mendorong loyalitas.<sup>6</sup> Lebih lanjut Panebianco melihat ada dua kriteria dalam pelembagaan yaitu derajat otonomi lingkungan dan tingkat internal *systemness* atau saling ketergantungan dari berbagai sektor.<sup>7</sup>

Argument lain dikatakan oleh Levitsky (1998) yang berpendapat perlunya untuk membedakan dua aspek yang disebut 'sumber kohesi' dari nilai identitas dan aturan prosedural.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Kenneth Janda (1980), pelembagaan sebagai salah satu dari beberapa aspek hubungan eksternal partai dan fitur internal organisasi. Pelembagaan menyangkut proses tereifikasi (pencitraan) partai dalam pikiran publik. Gagasan pelembagaan partai menurut Randall, dapat diringkas sebagai: adaptasi, *systemness* (koherensi/kompleksitas), nilai infusi/ideologi, pelembagaan eksternal dan otonomi.<sup>9</sup>

	<b>Internal</b>	<b>External</b>
<b>Structural</b>	<i>Systemness</i>	<i>Decisional Autonomy</i>
<b>Attitudinal</b>	<i>Value Infusion</i>	<i>Reification</i>

*Systemness* adalah meningkatnya ruang lingkup, kepadatan dan keteraturan interaksi partai sebagai struktur. Keteraturan menyiratkan gelar dari rutinisasi, dan membimbing perilaku. *Value infusion* partai mampu menciptakan sistem nilai atau budaya khas sendiri dan dapat dilihat

<sup>5</sup> Samuel Huntington. 1968. *Political Order in Changing Societies*. New Haven, CT: Yale University Press

<sup>6</sup> Panebianco, Angelo Panebianco. 1988. *Political Parties: Organization and Power*. Cambridge: Cambridge University Press.

<sup>7</sup> *ibid*

<sup>8</sup> Steven Levitsky. 1998. *Institutionalization and Peronism: The Concept, the Case and the Case for Unpacking the Concept*, *Party Politics* 4: 77-92

<sup>9</sup> Kenneth Janda. 1980. *Political Parties: A Cross-National Survey*. London: Macmillan

sebagai aspek penting dari kohesi partai. *Decisional autonomy* kemampuan untuk menentukan kebutuhan partai pada tingkat otonomi putusan atau kebebasan dari campur tangan dalam menentukan strategi dan kebijakan. *Reification* mengacu sejauh mana eksistensi partai didirikan masuk dalam imajinasi publik. Seperti menjadi semakin menjadi diambil untuk diberikan fitur dari politik cakrawala, individu dan lembaga, termasuk pihak-pihak lain, akan lebih atau kurang sadar menyesuaikan harapan dan aspirasi mereka sesuai.<sup>10</sup>

Dimensi internal atau struktural sistem partai dari *systemness* yaitu: cara partai berasal dan tumbuh, sumber daya yang relevan dan pendanaan, peran pemimpin partai individu vs organisasi partai seperti itu, peran faksi versus partai secara keseluruhan dan implikasi dari *clientelism*. 'Party-building', sejauh mana partai telah dibangun melalui suatu proses-proses dari 'penetrasi' dari pusat ke pinggiran atau 'difusi'. Bentuk partai di awal proses konsolidasi penting dalam melihat demokratisasi kedepannya. Persoalan yang muncul dominasi satu kelompok, keterbatasan pendanaan partai, meningkatkan *systemness* partai dilakukan oleh pemimpin dengan menonjolkan karisma (tidak bertahan lama), faksi partai, klientalisme dan patronase yang bertentangan dalam institusionalisasi partai.<sup>11</sup>

Beralih ke internal atau dimensi sikap pelebagaan partai, yaitu basis popularitas: identitas kelas sangat minim lebih didominasi nilai agama. Dampak klientalisme: basis partai ditentukan logika instrumental bukan loyalitas. *Decision Autonomy* struktural atau eksternal, yaitu ketergantungan partai pada aktor-aktor eksternal. Kehadiran lembaga mensponsori akan cenderung menghasilkan pelebagaan. Reifikasi Partai ( dimensi sikap / eksternal ), proses ini tergantung pada kekuatan organisasi partai dan akses ke sarana komunikasi yang efektif. Adanya kendala kemampuan partai untuk bertahan dari waktu ke waktu karena organisasi yang belum solid dan kemampuan anggota dalam mempertahankan semacam identitas.<sup>12</sup>

Dalam kasus ini, penulis ingin melihat pelebagaan partai dari sisi *decisional autonomy*, dimana partai politik harus bebas dari campur tangan pihak luar partai ataupun pihak manapun dalam menentukan strategi dan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh partai tersebut, sehingga partai tersebut dapat dikatakan sebuah partai yang otonom.

---

<sup>10</sup>Vicky Randall and Lars Svåsand. 2002. "Party Institutionalization in New Democracies". Party Politics. London: SAGE Publication

<sup>11</sup>*ibid*

<sup>12</sup>*ibid*

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian analisis wacana. Analisis Wacana akan memungkinkan untuk memperlihatkan motivasi yang tersembunyi di belakang sebuah teks atau di belakang pilihan metode penelitian tertentu untuk menafsirkan teks. Sedangkan pengertian wacana sendiri adalah cara tertentu untuk membicarakan dan memahami dunia (atau aspek dunia) ini<sup>13</sup>. Analisis Wacana Kritis itu tidak lebih dari dekonstruktif membaca dan menafsirkan masalah atau teks (sambil tetap ingat bahwa teori-teori postmodern memahami setiap penafsiran realitas, karena itu, realitas itu sendiri sebagai teks. Setiap teks dikondisikan dalam suatu wacana, sehingga disebut *Discourse Analysis*<sup>14</sup>.

## KONSTELASI POLITIK : ETNIS TIONGHOA DALAM PDIP

Pada tahun 2010, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengadakan kongres dalam menentukan kepengurusan yang baru dalam struktur organisasinya. Puncak Kongres III PDI Perjuangan ditandai dengan pengumuman sekaligus pelantikan pengurus DPP PDI Perjuangan 2010-2015 pada hari kamis (8/4/2010)<sup>15</sup>. Setelah melalui pembahasan oleh formatur tunggal, susunan kepengurusan disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Sejumlah wajah baru menghiasi kepengurusan itu, di antaranya terpilihnya Tjahjo Kumolo sebagai Sekjen PDI Perjuangan. Mereka yang terpilih sebagai para ketua DPP PDI Perjuangan dan Sekjen PDI Perjuangan itu disampaikan Mega di hadapan jajaran pengurus dan utusan kongres PDI Perjuangan di Hotel Inna Grand Bali Beach. Struktur kepengurusan partai PDIP yang dikeluarkan pada tahun 2010 dan berlaku hingga 2015 seperti berikut<sup>16</sup> :

---

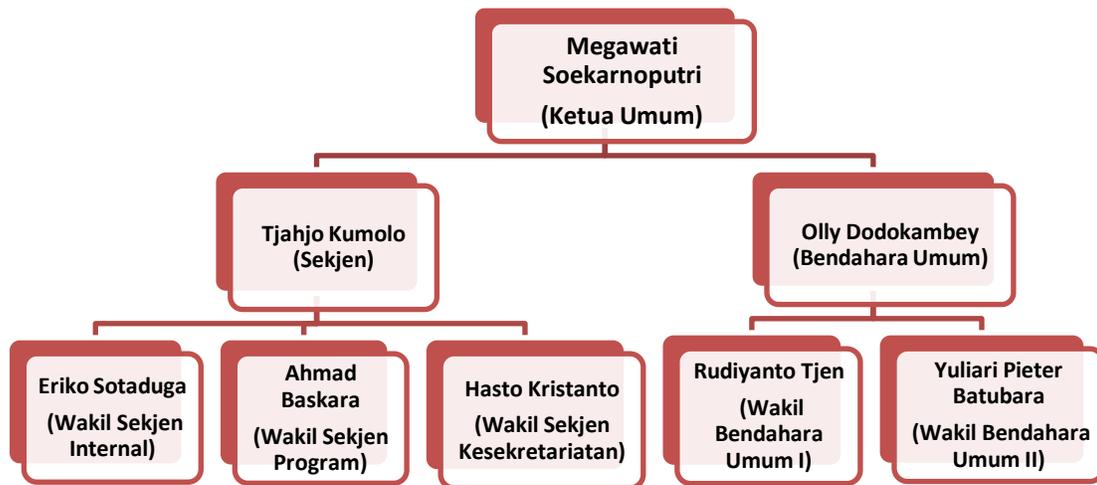
<sup>13</sup> Marianne W Jorgensen. 2007. *Analisis Wacana: Teori dan Metode*, (Pustaka Pelajar), hlm. 2

<sup>14</sup> *ibid*

<sup>15</sup> *Inilah Susunan Pengurus DPP PDIP 2010-2015*

<http://nasional.kompas.com/read/2010/04/08/17443474/Inilah.Susunan.Pengurus.DPP.PDIP.20102015> diakses pada tanggal 17 Mei 2014 pukul 9.53 WIB

<sup>16</sup> *ibid*



Dari struktur kepengurusan diatas, merupakan struktur kepengurusan inti dari sebuah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Di dalam kepengurusan inti saja, kita sudah dapat melihat bahwa ada tim pengurus inti partai yang berasal dari etnis Tionghoa, yaitu Rudiyanto Tjen sebagai wakil bendahara umum I. Hal ini menyiratkan bahwa, masyarakat etnis Tionghoa sudah menjadi sosok yang cukup penting didalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sehingga mereka dapat masuk didalam kepengurusan inti partai tersebut.

Sebenarnya, munculnya banyak orang Tionghoa di panggung politik Indonesia, sudah terjadi sejak pasca reformasi. Tercatat nama-nama seperti Kwik Kian Gie, Tjandra Wijaya Wong, Murdaya Po, Daniel Budi Setiawan, Rudianto Tjen (dari partai PDIP), Alvin Lie (PAN), Enggartiasto Lukita (partai Golkar), LT Susanto (Partai Bhineka Tuggal Ika), serta Albert Yaputra dan Ernawati Sugondo (partai Demokrat)<sup>17</sup>. Untuk pertama kalinya dalam era reformasi, orang Tionghoa dapat duduk mewakili rakyat Indonesia di Dewan Perwakilan Rakyat.

Begitu pula Kwik Gian Gie yang diangkat menjadi menteri dalam kabinet di bawah Presiden Abdurrahman Wahid dan diteruskan dalam kabinet di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri. Posisi politik setinggi ini dipandang sebagai terobosan terpenting sejak Oey Tjoe Tat pada masa pemerintahan Soekarno. Sesduah Kwik Gian Gie, Mari Elka Pangestu diangkat

<sup>17</sup>Setelah Air Mata Kering. Op.cit, 39-40

menjadi menteri dalam kabinet di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009).

Dari data tersebut, mayoritas masyarakat etnis Tionghoa mendiami Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, karena menurut mereka partai tersebut satu-satunya partai yang dapat menyalurkan aspirasi warga Tionghoa dan memberikan mereka hak politik yang sama dengan etnis lain yang ada di Indonesia. Seperti kutipan berikut ini :<sup>18</sup>



Berita diatas menyajikan salah satu bukti bahwa masyarakat Tionghoa khususnya di Sumatera Utara menilai Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) sebagai partai yang paling nyaman untuk menyalurkan aspirasi politik warga Tionghoa. Alasannya mereka adalah karena PDIP memberikan hak politik yang sama dengan warga negara Indonesia yang lainnya, yakni untuk dipilih dan bukan hanya dipilih. Seperti yang kita semua ketahui bahwa memang realita atau kenyataannya, kita sering menjumpai etnis Tionghoa di dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lebih sering dan banyak dibandingkan dengan partai lainnya. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Tionghoa pun mampu memasuki partai-partai lain seperti Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Golkar dan Partai yang dahulu berbasis Islam sekaligus seperti Partai Amanat Nasional (PAN). Masyarakat Tionghoa memang merata hampir diseluruh Partai yang ada di Indonesia saat ini, namun tetap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lah yang memegang quota terbanyak etnis Tionghoa.

<sup>18</sup>Etnis Tionghoa Nilai PDI Perjuangan Partai Nyaman

<http://www.antarasumbar.com/berita/nusantara/d/22/265279/etnis-tionghoa-nilai-pdi-perjuangan-partai-nyaman.html>

Pentingnya masyarakat Tionghoa bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak hanya sebatas itu, banyak masyarakat etnis Tionghoa yang kaya raya di Indonesia membantu pendanaan partai berlambang kepala banteng tersebut. Tentu hal ini bukanlah hal yang baru kita dengar, sebab berita ini sudah menyebar sejak lama bahwa Partai PDIP disokong dananya oleh banyak konglomerat Cina. Seperti kutipan berita berikut :<sup>19</sup>



Kutipan berita tersebut merupakan contoh bahwa keuangan Partai PDIP memang sesungguhnya banyak disokong oleh orang-orang yang memiliki kepentingan seperti masyarakat etnis Tionghoa. Dalam berita tersebut mengatakan bahwa PDIP sengaja melakukan konsolidasi dengan para pengusaha besar di Indonesia yang mayoritas adalah para konglomerat China, sepertinya dari dahulu kala hingga saat ini Megawati tidak bisa lepas dari para konglomerat China. Hingga untuk pemilihan umum presiden 2014, PDIP tetap disokong dananya oleh para konglomerat tersebut. Para konglomerat China memang mempunyai dana atau keuangan yang sangat luar biasa banyaknya, sehingga dapat menggerakkan orang-orang bahkan partai politik yang sekiranya dapat membantu, memudahkan ataupun melancarkan usaha atau pekerjaan mereka. Saat ini memang perekonomian Indonesia telah dikuasai oleh etnis Tionghoa, oleh karena itu bukanlah hal yang aneh ketika mereka saat ini menjadi sumber yang cukup penting bagi pendanaan suatu partai politik.

Suatu hal yang mustahil saat ini didalam perpolitikan kita ketika ada orang lain yang membantu partai kita tetapi tidak mengharapkan apapun dari partai tersebut. Pasti penyokong

<sup>19</sup>Mega Memilih Rakyat Marhaen atau Konglomerat Cina  
<http://www.voaindonesia.com/read/indonesiana/2014/03/14/29490/mega-memilih-rakyat-marhaen-atau-konglomerat-cina/#sthash.web3OiCc.dpbs>, diakses pada tanggal 3 Juni 2014 pukul 1:37 WIB

dana tersebut mempunyai maksud dan tujuan tertentu, yang pastinya mendatangkan keuntungan bagi pendonor dana tersebut. Seperti kutipan berita berikut :<sup>20</sup>



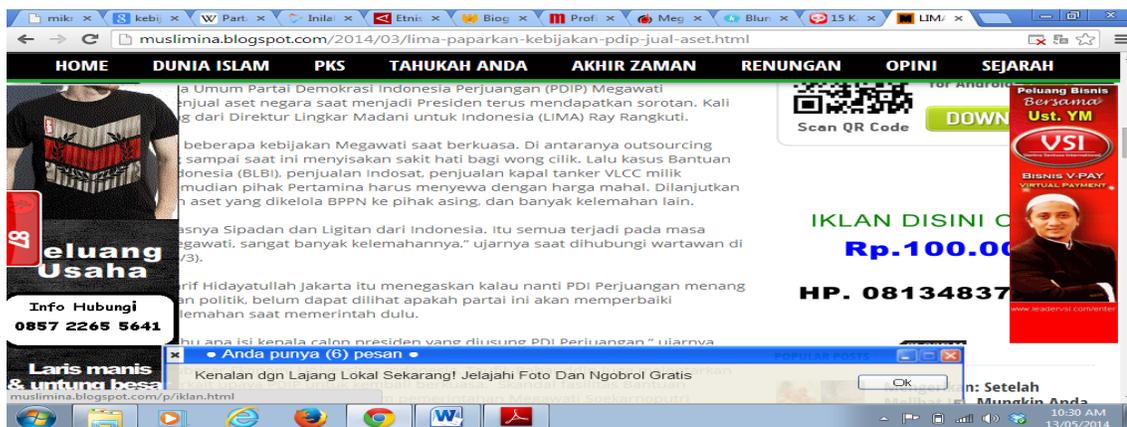
Dari berita tersebut diatas, jelas mencerminkan bahwa hubungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sangat dekat dengan masyarakat Tionghoa. Terbukti dari berita tersebut yang mengatakan bahwa adanya beberapa kali studi banding yang dilakukan oleh kader Partai PDIP ke negara China. Studi banding yang dilakukan beberapa kali dan secara rutin tersebut, menyiratkan bahwa hubungan Partai PDIP dengan China sangat erat. Terbukti dari selalu datangnya kader PDIP untuk memenuhi undangan Partai Komunis China di China. Relasi antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan China, tidak dapat dianggap sebuah relasi yang biasa, tetapi dengan adanya relasi yang intens, sering dan dilakukan tidak hanya sekali menginsyaratkan bahwa relasi diantara PDIP dengan China sangatlah politis, dimana keduanya pasti memiliki keuntungan satu sama lain dari relasi tersebut dan simbiosis mutualisme pasti terbentuk dalam relasi tersebut.

Ketika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkuasa dibawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya yang tentunya sangat didukung dan disokong oleh partainya sendiri. Kebijakan-kebijakan tersebut sangatlah pro-China, semua kebijakan yang dikeluarkan sangat menguntungkan bagi China. Baik negara China ataupun pengusaha-pengusaha atau konglomerat

<sup>20</sup>15 Kader PDI Perjuangan Penuhi Undangan Partai Komunis China

<http://forum.detik.com/15-kader-pdi-perjuangan-penuhi-undangan-partai-komunis-china-t827062.html> diakses pada tanggal 09 Juni 2014 pukul 9.56 WIB

keturunan China yang saat ini mayoritas pengusaha tersebut sudah kabur dari Indonesia dan membawa kabur uang negara ini dalam nominal yang *fantastic*, seperti berita berikut :<sup>21</sup>



Dari pemberitaan tersebut jelas dikatakan bahwa pada saat kepemimpinan Megawati Soekarnoputri yang berarti masa kejayaan dari Partai PDIP tersebut, banyak mendatangkan kerugian bagi negara kita, bagi Indonesia. Seperti, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Jual Pertamina dan juga menjual gas murah ke China. Kebijakan-kebijakan tersebut sangat jelas bahwa kebijakan itu dibuat untuk kepentingan China, China merasa sangat diuntungkan dalam hal ini. Presiden memang memegang kekuasaan penuh pada masa dia menjabat sehingga apapun kebijakan yang ingin dikeluarkan pasti sangat *possible*, apalagi jika didukung oleh partainya sendiri dan dibantu oleh beberapa partai lain, pasti kebijakan tersebut akan dengan mudah dikeluarkan dan diwujudkan. Berita tersebut juga didukung oleh media tribunnews.com yang melansir berita seperti berikut :<sup>22</sup>

<sup>21</sup>LIMA Paparkan Kebijakan PDIP Jual Aset

<http://muslimina.com/2014/03/lima-paparkan-kebijakan-pdip-jual-aset.html>, diakses pada tanggal 3 Juni 2014 pukul 5:41 WIB

<sup>22</sup>Skandal fasilitas BLBI Dikhawatirkan Terulang Jika PDIP Berkuasa

<http://www.tribunnews.com/nasional/2014/03/25/skandal-fasilitas-blbi-dikhawatirkan-terulang-jika-pdip-berkuasa> diakses pada tanggal 3 Juni 2014 pukul 6:26 WIB



Berita-berita tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat etnis Tionghoa sangat berperan aktif dalam Partai PDIP. Mereka tidak sekedar ingin berpolitik melainkan mempunyai tujuan dan maksud tertentu dengan sengaja menyokong dana untuk partai sebanyak-banyaknya dan tentunya akan meminta imbalan ketika PDIP menang dalam pemilihan. Dalam berita tersebut, menurut Guru Besar Universitas Indonesia, Taufik Bahauddin, kasus seperti penyalahgunaan fasilitas BLBI dan penjualan aset negara pada masa pemerintahan PDIP, bisa saja terulang lagi jika PDIP berkuasa kembali pada pemilihan umum 2014. Hal ini tidak hanya dikatakan oleh Guru Besar Universitas Indonesia saja tetapi beberapa tokoh penting juga mengatakan hal yang sama.

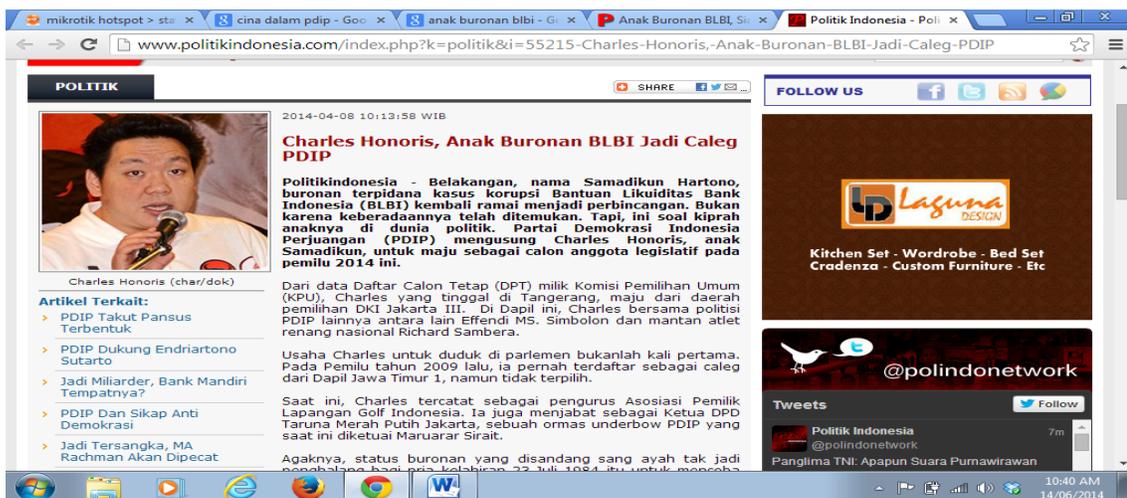
Ketakutan tentang hal yang samapun sesungguhnya juga tersirat dalam benak masyarakat, juga penulis karena sesungguhnya masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang cinta terhadap bangsa ini, yang masih mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa ini. Berita tersebut hanya memuat kebijakan yang dikeluarkan yang mendukung China, tetapi pada masa pemerintahan Megawati pun masih ada kebijakan yang sangat merugikan bangsa ini seperti hilangnya pulau Sipadan dan Lingitan dari pelukan bangsa ini, hal tersebut juga berdampak dengan banyaknya kontroversi di masyarakat kita, dimana masyarakat sangat kecewa dengan ketidaktegasan Presiden kita yaitu Megawati Soekarnoputri pada masa itu yang melepas dengan mudah kepulauan kita. Pemberitaan lain yang menguatkan pemberitaan tersebut adalah sebagai berikut :<sup>23</sup>

<sup>23</sup>Blunder PDIP dan Jokowi

<http://politik.kompasiana.com/2014/04/15/blunder-pdip-dan-jokowi-647926.html> diakses pada tanggal 3 Juni 2014 pukul 6:36 WIB



Dari berita diatas jelas bahwa Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) mengadakan pertemuan dengan beberapa perwakilan duta besar dari negara tetangga atau yang mempunyai hubungan bilateral dengan Indonesia seperti Amerika dan China. Hal ini menjadi hal yang janggal ketika pertemuan tersebut sengaja ditutup-tutupi dari media dan tidak diberitahukan apa yang dibicarakan. Tentunya hal ini mengundang banyak pertanyaan di benak masyarakat kita, jika memang benar tidak ada dukungan dari China maupun AS terhadap PDIP, mengapa pertemuan tersebut harus dirahasiakan agendanya? Ini menjadi menggelitik ketika suatu pertemuan diadakan tetapi tidak ada tujuan dan maksud tertentu dibalikinya.



Gambar diatas adalah foto seorang anak dari Samadikun Hartono, buronan terpidana kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang beberapa waktu lalu kembali ramai menjadi perbincangan. Bukan karena keberadaannya telah ditemukan., tetapi ini soal

kiprah anaknya di dunia politik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lah yang mengusung Charles Honoris, anak Samadikun Hartono, untuk maju sebagai calon anggota legislatif pada pemilu 2014 ini. Dari data Daftar Calon Tetap (DPT) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Charles yang tinggal di Tangerang, maju dari daerah pemilihan DKI Jakarta III. Charles Honoris bukan untuk pertama kalinya maju sebagai calon anggota legislative, tetapi pada tahun 2009 dia juga pernah mencalonkan diri sebagai calon legislatif dari dapil Jawa Timur 1 namun tidak terpilih. Hal ini juga menjadi salah satu bukti bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sangat membuka peluang bagi etnis Tionghoa meskipun semua orang tahu bahwa siapakah ayah dari Charles Honoris tersebut.<sup>24</sup>

Sepertinya status buronan yang disandang sang ayah tidak menjadi penghalang bagi pria kelahiran 23 Juli 1984 itu untuk mencoba peruntungan karir di dunia politik. Samadikun divonis 4 tahun penjara oleh Mahkamah Agung pada 28 Mei 2003 karena terbukti menyelewengkan dana BLBI sebesar Rp169 miliar. Dari jumlah itu, yang menjadi tanggung jawab Samadikun sekitar Rp11,9 miliar. Tetapi vonis MA tersebut belum bisa dieksekusi sampai saat ini, lantaran Samadikun kabur saat aparat menggerebek rumahnya. Saat ini, Kejaksaan Agung dan Interpol masih merilis Samadikun sebagai buron dalam laman resmi milik mereka. Kejagung menyebut, mengetahui terpidana Samadikun terakhir kali tinggal di Apartemen Beverly Hills Singapura. Dia disebutkan memiliki pabrik film di China dan Vietnam.<sup>25</sup>

## KESIMPULAN

Sejalan dengan gerakan reformasi dan didukung kebijakan politik dari Presiden Abdurrahman Wahid, warga keturunan China kini tak lagi hanya terfokus pada bidang ekonomi. Mereka mulai memasuki pula bidang politik yang selama ini seperti ditabukan. Selain mulai mencalonkan diri sebagai anggota parlemen, sejumlah warga keturunan China menjelang Pemilu 1999 memunculkan partai sendiri, seperti Partai Reformasi Tionghoa Indonesia, Partai Pembauran Indonesia, dan Partai Bhinneka Tunggal Ika. Partai Bhinneka Tunggal Ika bisa menempatkan wakilnya di DPR, yakni L Sutanto dari Kalimantan Barat (Kalbar). Jumlah wakil

---

<sup>24</sup> Charles Honoris Anak Buronan BLBI Jadi Caleg PDIP

<http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=55215-Charles-Honoris,-Anak-Buronan-BLBI-Jadi-Caleg-PDIP> diakses pada tanggal 14 Juni 2014 pukul 10.55 WIB

<sup>25</sup> *ibid*

rakyat dari warga keturunan China, dari periode ke periode keanggotaan Dewan, juga terus meningkat. Mereka bukan lagi mewakili daerah pemilihan yang merupakan basis warga keturunan China, seperti Kalbar, melainkan merata ke berbagai daerah.

Langkah Presiden Abdurrahman Wahid yang membuka ruang lebih luas bagi partisipasi warga keturunan China dalam kehidupan berbangsa menjadi salah satu momentum bersejarah dalam reformasi dan demokratisasi di Indonesia. Partisipasi komunitas Tionghoa sekarang ini makin variatif, tidak hanya diidentikkan dengan bisnis. Ini sekaligus menjadi tantangan bagi komunitas Tionghoa untuk semakin berkontribusi dalam memajukan bangsa. Dalam bidang politik, sejumlah kepala daerah juga dijabat keturunan China, seperti Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya dan Wali Kota Singkawang Hasan Karman. Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang saat ini telah menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Jokowi yang mencalonkan diri sebagai presiden.

Sejak reformasi, kebebasan politik bagi etnis China itu sangat besar. Lihat saja, beberapa orang etnis China kini bisa menjadi anggota parlemen, baik di pusat maupun di daerah. Sebagian lain menjadi pejabat pemerintahan. Kebebasan yang lebih besar itu juga bisa dilihat dari munculnya sejumlah organisasi komunitas China, termasuk pula koran dan berita yang berbahasa China.

Banyaknya etnis Tionghoa yang terjun dalam politik praktis dengan menjadi caleg tersebut merupakan fenomena positif. Kondisi itu dapat menjadi indikasi kesadaran politik etnis tionghoa semakin tinggi dengan berupaya untuk terlibat langsung dalam menentukan kebijakan politik. Apalagi jumlah etnis Tionghoa yang terjun dalam politik praktis tersebut semakin bertambah jika dibandingkan dengan penyelenggaraan Pemilu 2009. Namun, aspek kuantitas tersebut harus dapat diimbangi faktor kualitas dengan memperkuat kemampuan dan pemahaman terhadap sistem ketatanegaraan sehingga mampu berperan secara maksimal jika terpilih nantinya. Jika tidak diimbangi dengan aspek kualitas, keberadaan etnis tionghoa itu dapat menimbulkan pertanyaan. Untuk mampu meraih simpati masyarakat, politisi etnis Tionghoa tersebut harus mampu membuktikan kemampuan dan komitmen untuk mengabdikan, bukan sekadar mencari jabatan politik.

Tetapi, dengan banyaknya etnis Tionghoa di dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membuat partai tersebut menjadi tidak otonom dengan adanya beberapa

kebijakan yang dikeluarkan oleh partai PDIP yang pro-China dan sangat menguntungkan etnis Tionghoa, seperti yang sudah penulis jelaskan diatas. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada masa kejayaan atau kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang sangat mendukung dan pro-China, seperti :

1. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dan
2. Menjual gas murah ke China,

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) adalah skema bantuan (pinjaman) yang diberikan BI kepada bank-bank yang mengalami masalah. Banyak bank di Indonesia yang alami kesulitan likuiditas pada saat krisis moneter 1998 di Indonesia dan hamper seuruh bank di Indonesia dimiliki oleh orang-orang China, sehingga dana BLBI banyak sekali yang jatuh ke tangan mereka dan uang tersebut dibawa kabur entah kemana dan tidak dikembalikan.

Kebijakan-kebijakan tersebut sangat menyesakkan dada dan sangat merugikan bangsa Indonesia sampai saat ini. Negara kita ditaksir merugi hingga triliunan rupiah dan berdampak sangat buruk terhadap bangsa ini. Implikasi dari kebijakan-kebijakan tersebut masih terasa hingga saat ini, karena kebijakan yang sangat politis tersebut, bangsa Indonesia mempunyai hutang yang luar biasa ke negara lain. Sungguh sikap yang tidak bertanggung jawab dimana membawa kabur uang negara dan saat ini tidak tahu kemana rimbanya. Kasus tersebut pada masa Megawati Soekarnoputri sangatlah aman, para perampok uang tersebut tidak dipidana ataupun diperiksa, pelaku pencurian uang negara tersebut sangat bebas lenggang untuk melarikan diri dari Indonesia. Hal itu banyak membuat rakyat geram dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, tetapi apa daya, Presiden memang memegang kekuasaan penuh saat menjabat. Sehingga para pelaku pencurian uang negara itupun sangat bebas dan aman dalam melakukan aksinya.

Dari hal tersebut sangatlah jelas bahwa ketika suatu kelompok mengintervensi suatu kebijakan sebuah organisasi semisal partai politik, dan itu menjadi mengubah ataupun mengeluarkan kebijakan yang sangat politis dengan mendukung kelompok tersebut maka partai politik itu sudah tidak otonom lagi dengan terlihat jelas keberpihakannya ke salah satu kelompok tersebut. Padahal menurut Huntington dalam pelembagaan partai yang sudah penulis jelaskan diatas, jelas bahwa stabilitas, kekokohan partai dan sistem kepartaian sangat bergantung pada

tingkat pelebagaan dan pastisipasinya. Jika pelebagaan suatu partai buruk, maka otomatis partai tersebut tidak dapat stabil, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang tidak dapat melebagaan partainya dengan baik karena keotonoman partai tersebut masih dipertanyakan.

Partai politik saat ini menjadi media dimana kelompok-kelompok atau orang-orang tertentu yang mempunyai visi misi tertentu pula yang ingin mewujudkan impiannya ataupun ingin melancarkan visi misinya tersebut. Partai politik menjadi sebuah sasaran empuk bagi oknum-oknum yang ingin meraih keuntungan atas keanggotaannya di dalam suatu partai politik.

Oleh karena itu, saat ini partai politik menjadi “setengah hati” keberadaannya dilingkungan masyarakat yang memang telah memahami hal-hal tersebut. Keberadaan, kekuatan serta kemandirian partai politik sangatlah perlu untuk meyakini masyarakat bahwa partai politik tersebut memang benar-benar membela rakyat, tidak sekedar ingin mewujudkan visi misi kelompok tertentu. Partai politik memang sangat perlu dan memang seharusnya otonom agar masyarakat bisa sepenuhnya percaya dan antusias kembali dengan euphoria perpolitikan di negara kita. Otonom itu sendiri juga sangat membantu dalam menguatkan serta eksistensi partai politik itu sendiri, karena banyak sekali partai yang berguguran ataupun bubar karena partai tersebut tidak otonom. Partai politik yang otonom akan melahirkan kader-kader yang tentunya akan sangat baik dan saya sangat percaya itu. Karena penilaian suatu partai politik itu baik atau buruk, hal itu bisa dilihat dan dinilai dari bagaimana kader-kadernya, dari bagaimana kualitas personal kader-kader yang bernaung dibawah partai politik tersebut. Sehingga ketika sebuah partai politik memang otonom, maka otomatis kualitas setiap kader yang ada didalamnya akan terlihat baik pula karena konsisten terhadap partainya dan tidak terpengaruh oleh pihak-pihak luar yang ingin mengintervensi.

## DAFTAR PUSTAKA

- I. Wibowo dan Thung Ju Lan. 2010. *Setelah Air Mata Kering: Masyarakat Tionghoa Pasca Peristiwa Mei 1998* (Jakarta: Kompas Media Nusantara)
- T.H. Marshall. 1965. *Class, Citizenship and Social Development* (New York: Double Day)
- Suhardinata, Dr. Ir Justian. 2009. *WNI Keturunan Tionghoa dalam stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia pustaka Utama

Huntington, Samuel. 1968. *Political Order in Changing Societies*. New Haven, CT:Yale University Press

Panbianco, Angelo. 1988. *Political Parties: Organization and Power*. Cambridge: Cambridge University Press.

Levitsky, Steven. 1998. *Institutionalization and Peronism: The Concept, the Case and the Case for Unpacking the Concept*, *Party Politics* 4: 77–92

Janda, Kenneth. 1980. *Political Parties: A Cross-National Survey*. London: Macmillan

Randall, Vicky and Svåsand, Lars. 2002. “*Party Institutionalization in New Democracies*”. *Party Politics*. London: SAGE Publication

Schwarz, Adam. 1994. *A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s* (Australia: Allen&Unwin)

*Arti Lambang Partai Demokrasi Indonesia*

<http://elektabilitas.blogspot.com/2013/06/arti-lambang-partai-demokrasi-indonesia.html>

*Blunder PDIP dan Jokowi*

<http://politik.kompasiana.com/2014/04/15/blunder-pdip-dan-jokowi-647926.html>

*Charles Honoris Anak Buronan BLBI Jadi Caleg PDIP*

<http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=55215-Charles-Honoris,-Anak-Buronan-BLBI-Jadi-Caleg-PDIP>

*Etnis Tionghoa PDI Perjuangan Partai Nyamann*

<http://www.antarasumbar.com/berita/nusantara/d/22/265279/etnis-tionghoa-nilai-pdi-perjuangan-partai-nyaman.html>

*Inilah Susunan Pengurus DPP PDIP 200-2015*

<http://nasional.kompas.com/read/2010/04/08/17443474/Inilah.Susunan.Pengurus.DPP.PDIP.20102015>

*LIMA Paparkan Kebijakan PDIP Jual Aset*

<http://muslimina.com/2014/03/lima-paparkan-kebijakan-pdip-jual-aset.html>

*Mega Memilih Rakyat Marhaen atau Konglomerat Cina*

<http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/03/14/29490/mega-memilih-rakyat-marhaen-atau-konglomerat-cina/#sthash.web3OiCc.dpbs>

*Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)*

<http://www.ceritamu.com/info/politik/partai-demokrasi-indonesia-perjuangan-pdip>

*Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)*

<http://www.kampanyeonline.com/partai-politik/partai-demokrasi-indonesia-perjuangan-pdip>

*PDI Perjuangan (PDIP)*

<http://www.pemilu.com/pdip/>

*Skandal Fasilitas BLBI Dikhawatirkan Terulang Jika PDIP Berkuasa*

<http://www.tribunnews.com/nasional/2014/03/25/skandal-fasilitas-blbi-dikhawatirkan-terulang-jika-pdip-berkuasa>

*Warga Tionghoa Politik di Indonesia*

<http://politik.kompasiana.com/2014/02/01/warga-tionghoa-politik-di-indonesia-630372.html>

*15 Kader PDI Perjuangan Penuhi Undangan Partai Komunis China*

<http://forum.detik.com/15-kader-pdi-perjuangan-penuhi-undangan-partai-komunis-china-t827062.html>